



# PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG

: EKSEKUTIF

LEMBAGA

: PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

**UNIT KERJA** 

: PIMPINAN TERTINGGI

SUB UNIT KERJA

: KEPALA LEMBAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama

: ANDI SETO GADHISTA ASAPA, SH., LLM

2. Jabatan

: BUPATI

3. NHK

: 401261

## II. DATA HARTA

## A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp.

12.800.000.000

- 1. Tanah dan Bangunan Seluas 435 m2/361 m2 di TANGERANG SELATAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 8.000.000.000
- Tanah Seluas 5341 m2 di KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
- 3. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/100 m2 di KOTA MAKASSAR , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 2.300.000.000

### **B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp.

1.665.000.000

- 1. MOTOR, KAWASAKI NINJA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
- MOBIL, LEXUS NX300 F-SPORT 4X2 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
- MOBIL, TOYOTA VOXY 2.0 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

E HADTA I AININYA	
E HADTA I AININVA	000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. 100.	500.000
	000.000
Sub Total Rp. 34.975.	500.000
I. HUTANG Rp. 958.	000.000
7. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 34.017.	500.000

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.







Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui <u>elhkpn.kpk.go.id</u>, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 9 Maret 2020.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

#### LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :-

Nama (sesuai dengan KTP): ANDI SETO GADHISTA ASAPA, SH., LLM

Tempat/Tanggal Lahir : MAKASSAR / 20 November 1983

Nomor KTP/NIK : 3674012011830002

Alamat : JALAN PERSATUAN RAYA RT. 001, RW. 001, BIRINGERE, SINJAI UTARA, SINJAI, SULAWESI SELATAN

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa"), ----

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada: ---

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

#### ---KHUSUS----

Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:

- a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
- b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek:
- c. Badan usaha dan/ atau perusahaan

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: -----

- 2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada: -
  - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
  - b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
  - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampuan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.





\*) Lembaran ini dapat difotokopi dan diperbanyak sesuai dengan kebutuhan

\*\*) Coret yang tidak perlu

Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

13-February-2020 Pemberi Kuasa,

DBSSBAHFO4736339

DI STO GADHISTA